

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kajian Hubungan Internasional, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau *Summit Meeting* didefinisikan sebagai forum diplomasi multilateral tertinggi yang melibatkan langsung para kepala negara atau kepala pemerintahan. Forum ini memiliki bobot politik yang kuat karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan sikap resmi negara-negara anggota, tetapi juga menunjukkan tingkat komitmen kolektif dalam merespons isu-isu strategis global. Dalam kondisi tertentu, ketika terjadi krisis mendesak yang tidak dapat ditangani melalui mekanisme reguler, organisasi internasional dapat menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) sebagai mekanisme diplomasi darurat untuk mengoordinasikan respons bersama.¹

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan organisasi internasional terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan 57 negara anggota yang tersebar di berbagai kawasan. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada tahun 1969 sebagai Respons terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, sebuah peristiwa yang memicu kesadaran kolektif dunia Islam akan pentingnya solidaritas politik lintas negara. Sejak awal berdirinya, OKI memposisikan isu Palestina dan perlindungan tempat-tempat suci umat Islam sebagai mandat moral dan politik utama, sekaligus simbol persatuan dunia Islam di tengah sistem internasional yang didominasi kekuatan Barat.²

Seiring perkembangan geopolitik global pasca Perang Dingin, dunia Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.³ Konflik tidak lagi terbatas pada isu pendudukan wilayah, tetapi juga meluas ke konflik bersenjata internal, intervensi asing, ekstremisme, serta krisis kemanusiaan berskala besar.⁴ Peristiwa

¹ G.R. Berridge, *Diplomacy: Theory and Practice*. (London-New York: Prentice Hall-Harvester Wheatsheaf, 1995).

² The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Declaration of The Rabat First Islamic Summit Conference" (Rabat, 1969), www.oic-oci.org. diakses 21 November 2025 pukul 23.52

³ Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991).

⁴ Atef. Abdurrofik, "Identitas Islam Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina,

11 September 2001 dan invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, diikuti gelombang Arab Spring sejak 2011, menandai fase krisis multidimensional yang berdampak luas terhadap stabilitas politik negara-negara anggota OKI. Dalam konteks ini, mekanisme reguler organisasi internasional sering kali dinilai lamban dan tidak Responsif terhadap eskalasi konflik yang terjadi secara cepat.⁵

Sebagai Respons terhadap situasi tersebut, OKI semakin mengandalkan mekanisme Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) sebagai sarana utama dalam merespons konflik dan krisis dunia Islam.⁶ Sejak tahun 1997 hingga 2016, OKI telah menyelenggarakan lima KTT Luar Biasa yang masing-masing dipicu oleh tekanan geopolitik dan konflik besar, mulai dari eskalasi konflik Palestina, ancaman invasi Irak, kebutuhan reformasi internal organisasi pasca 9/11, konflik internal dunia Islam akibat *Arab Spring*, hingga kembali menguatnya isu Yerusalem dan Al-Quds Al-Sharif. Intensitas penyelenggaraan KTT Luar Biasa ini menunjukkan bahwa forum tersebut menjadi arena sentral bagi OKI dalam mengekspresikan solidaritas politik dan membangun konsensus kolektif.⁷

Namun demikian, frekuensi penyelenggaraan KTT Luar Biasa tidak serta-merta berbanding lurus dengan efektivitas penyelesaian konflik. Meskipun forum ini secara konsisten menghasilkan deklarasi dan resolusi yang menegaskan komitmen solidaritas dunia Islam, berbagai konflik utama tetap berlangsung dalam jangka panjang dan bahkan mengalami eskalasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana KTT Luar Biasa OKI berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang substantif, atau justru lebih berperan sebagai mekanisme simbolik dalam menjaga kohesi politik di tengah fragmentasi kepentingan negara-negara anggota.⁸

KTT Luar Biasa ke-1 tahun 1997 di Islamabad lahir dari kebutuhan untuk

Studi Kasus: Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Tahun 2016 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Di Jakarta,” *Jurnal Populis* 1, no. 1 (n.d.): 99–100.

⁵ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), “OIC Charter” (Dakar, 2008).

⁶ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC).

⁷ Ekmeleddin Ihsanoglu, *The Islamic World in the New Century: The Organization of the Islamic Conference, 1980–2010*. (New York: Columbia University Press., 2010).

⁸ Turan Kayaoglu, *The Organization of Islamic Cooperation Politics, Problems, and Potential*, 1st ed. (London: Routledge, 2015).

menggalang solidaritas tingkat tinggi terhadap isu Palestina dan Al-Quds yang memburuk pada akhir 1990-an. Dalam suasana dunia Islam yang diwarnai ketegangan kawasan dan meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan, Pakistan mendorong agar para pemimpin negara anggota duduk bersama untuk menyusun sikap kolektif. Pertemuan ini bukan hanya untuk merespons krisis Palestina, tetapi juga menjadi penanda awal bahwa OKI siap membangun mekanisme pertemuan darurat demi menghadapi isu-isu yang dianggap menyentuh jantung identitas politiknya.⁹

KTT Luar Biasa ke-2 tahun 2003 di Doha berlangsung dalam suasana sangat berbeda. Dunia berada di ambang invasi AS ke Irak dan kawasan Timur Tengah menghadapi kekhawatiran besar terhadap masa depan stabilitas regional. Dalam kondisi inilah OKI merasa perlu merespons secara kolektif. Doha menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk menyuarakan keprihatinan, menolak upaya intervensi militer, dan menegaskan kembali komitmen atas kedaulatan Irak. Meskipun perbedaan kepentingan antarnegara cukup tajam, terlihat dari ketegangan diplomatik antara Irak dan beberapa negara Teluk, KTT ini mencerminkan usaha OKI untuk mempertahankan posisi moral dan politiknya di tengah krisis internasional.¹⁰

KTT Luar Biasa ke-3 tahun 2005 di Makkah, alih-alih merespons perang atau pendudukan, pertemuan ini lebih bersifat reflektif. Dampak global 9/11 dan meningkatnya stereotip negatif terhadap dunia Islam mendorong para pemimpin OKI untuk menata ulang arah organisasi. Pertemuan ini menghasilkan cetak biru ambisius yang disebut Program Aksi Sepuluh Tahun (*OIC 10-Years Program of Action*), dengan fokus pada modernisasi, tata kelola yang baik, dan penguatan nilai toleransi serta moderasi. KTT ini menandai titik balik penting ketika OKI berusaha memperbaiki citra dan efektivitasnya, bukan hanya sebagai forum politik, tetapi juga sebagai organisasi yang relevan dalam pembangunan dan

⁹ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Islamabad Declaration of the Extraordinary Session of Islamic Summit" (Islamabad, Pakistan: United Nation, 1997), <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-183274>.

¹⁰ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Communiqué on Iraq and Declaration on Palestine Adopted at the Second Emergency Session of the Islamic Summit Conference," *United Nation*, vol. 36770 (Doha, Qatar, 2003), <http://dx.doi.org/10.1163/156856707779160799>.

diplomasi multilateral.¹¹

KTT Luar Biasa ke-4 tahun 2012 di Mekkah, gelombang *Arab Spring* mengubah lanskap politik hampir seluruh kawasan. Revolusi, pergolakan sosial, dan perang saudara menguji hubungan internal negara-negara anggota. Di tengah situasi inilah OKI kembali berkumpul dalam KTT Luar Biasa 2012. Fokus utamanya adalah menjaga solidaritas dan mencegah perpecahan yang semakin menganga. Salah satu keputusan paling mencolok adalah penangguhan keanggotaan Suriah, yang mencerminkan dilema antara prinsip solidaritas dan realitas konflik internal. KTT ini memperlihatkan bahwa OKI sering berada dalam posisi sulit ketika krisis muncul bukan dari luar, tetapi dari tubuh dunia Islam sendiri.¹²

KTT Luar Biasa ke-5 tahun 2016 di Jakarta, KTT ini membawa OKI kembali ke isu pendiriannya yaitu Palestina dan Al-Quds. Diselenggarakan atas permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, pertemuan ini menjadi Respons terhadap eskalasi situasi di wilayah pendudukan serta ancaman terhadap status Yerusalem.¹³ Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat advokasinya bagi Palestina, menghasilkan *Jakarta Declaration* yang menegaskan kembali dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina dan pentingnya solusi dua negara. Bagi Indonesia, KTT ini juga menjadi panggung diplomatik penting untuk menunjukkan peranan strategisnya di dunia Islam.¹⁴

Jika ditinjau secara kronologis, lima KTT Luar Biasa OKI pada periode 1997-2016 memperlihatkan adanya dinamika respons organisasi terhadap perubahan lanskap konflik dunia Islam. Fokus awal pada isu Palestina kemudian meluas ke konflik Irak dan keamanan global pasca 9/11, berlanjut pada upaya reformasi

¹¹ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Makkah Declaration on Third Extraordinary Islamic Summit" (Mekah, 2005), <https://ww1.oic-oci.org/ex-summit/english/10-years-plan>.

¹² The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Final Communiqué Adopted by the Fourth Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference " Promotion of Islamic Solidarity "" (Mekah, 2012), <https://new.oic-oci.org/SitePages/ConferenceDetailsConferenceWiseEN.aspx?Item=103&ConfId=12>.

¹³ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Resolusi KTT LB OKI Ke-5" (Jakarta, 2016), <https://new.oic-oci.org/SitePages/ConferenceDetailsConferenceWiseEN.aspx?Item=104&ConfId=12>.

¹⁴ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC), "Jakarta Declaration on Palestine and Al-Quds Al-Sharif" (Jakarta, 2016).

internal OKI, serta dihadapkan pada konflik internal dunia Islam seperti Suriah dan krisis kemanusiaan akibat *Arab Spring*. Pola ini menunjukkan bahwa Respons OKI tidak bersifat statis, melainkan bergerak mengikuti tekanan geopolitik regional dan global. Namun, dinamika tersebut juga mengungkap keterbatasan organisasi dalam mengimplementasikan keputusan kolektif secara efektif di tengah perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota.

Sejauh ini, kajian akademik mengenai OKI cenderung menyoroti organisasi ini sebagai aktor normatif yang lemah dalam sistem internasional, khususnya dalam isu Palestina. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menempatkan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa sebagai mekanisme utama Respons krisis OKI dan menganalisisnya secara historis-kronologis dalam rentang waktu yang panjang masih relatif terbatas. Padahal, KTT Luar Biasa merupakan ruang penting untuk memahami bagaimana solidaritas dunia Islam dinegosiasikan, bagaimana kepentingan nasional berinteraksi dalam forum multilateral, serta bagaimana pola Respons kolektif OKI terbentuk dan berubah dari waktu ke waktu.

Untuk memperjelas fokus kajian, penelitian ini memiliki batasan masalah yang tegas. Skripsi ini tidak dimaksudkan untuk membahas konflik dunia Islam secara keseluruhan dalam dimensi politik, militer, maupun kemanusiaan yang luas, melainkan secara spesifik menganalisis konflik-konflik dunia Islam sebagaimana dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan dirumuskan dalam agenda serta keputusan yang dibahas di meja perundingan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI. Dengan demikian, objek utama kajian adalah forum KTT Luar Biasa itu sendiri termasuk latar belakang penyelenggaraan, isu yang diangkat, serta pola Respons kolektif yang dihasilkan bukan dinamika konflik di lapangan secara detail.

Tahun 1997 dipilih sebagai titik awal penelitian karena menandai penyelenggaraan KTT Luar Biasa pertama OKI yang menjadi fondasi institusional mekanisme diplomasi darurat organisasi tersebut. Adapun tahun 2016 ditetapkan sebagai titik akhir penelitian karena merupakan KTT Luar Biasa kelima yang diselenggarakan di Jakarta dan menjadi bagian konsolidasi respons kolektif OKI terhadap isu Palestina, yang sejak awal berdirinya organisasi

merupakan mandat utama dan simbol solidaritas politik dunia Islam.

Dengan pendekatan historis, penelitian ini berfokus pada latar belakang penyelenggaraan KTT Luar Biasa, pola Respons yang dihasilkan, serta keterbatasan dan implikasi politik dari mekanisme tersebut dalam konteks diplomasi kolektif dunia Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji **“Dinamika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dalam merespons Konflik Dunia Islam (1997-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, agar pembahasan dalam penelitian lebih jelas dan terstruktur secara sistematis, maka penulis menyusun suatu rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Mengapa mekanisme KTT LB OKI menjadi instrumen diplomasi utama OKI dalam merespons krisis dunia Islam sepanjang tahun 1997-2016?
2. Bagaimana respons OKI dalam rangkaian KTT LB dari 1997-2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang dijadikan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis latar belakang terjadinya KTT LB OKI dan kondisi historis konflik di dunia Islam tahun 1997-2016
2. Mendeskripsikan respons OKI terhadap konflik yang terjadi di dunia Islam tahun 1997-2016 melalui penyelenggaraan KTT LB OKI

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri sejumlah sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Literatur tersebut berfungsi sebagai acuan sekaligus sebagai pembanding dengan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat menunjukkan letak perbedaan dan kekhasan dari

penelitian yang penulis lakukan.

1. Skripsi hubungan Internasional Agwi Darma Nugraha (2017), “Kegagalan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menjadi organisasi yang efektif dalam menangani konflik Arab/Palestina-Israel”, penelitian yang dilakukan Nugraha ini merupakan evaluasi kritis terhadap kinerja Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menyoroti jurang antara komitmen retorik OKI dalam mendukung Palestina dan ketidakmampuannya mewujudkan hasil nyata (*outcome*) di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan OKI disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Secara internal, fragmentasi kepentingan nasional di antara negara-negara anggota menjadi hambatan utama; perpecahan ideologis dan aliansi geopolitik yang berbeda (pro-Barat vs pro-resistensi) menyebabkan OKI gagal mencapai suara tunggal dan aksi kolektif yang kohesif. Lebih lanjut, keterbatasan organisasi dalam mekanisme sanksi dan ketergantungan finansial pada beberapa negara donor besar membatasi independensi OKI dalam mengambil langkah-langkah politik yang berani. Secara eksternal, intervensi dan pengaruh kekuatan besar, khususnya Amerika Serikat, sering kali meminggirkan peran OKI dari proses perdamaian utama. Selain itu, sumber daya dan perhatian anggota OKI sering teralihkan oleh krisis regional mendesak lainnya (seperti krisis Irak atau ekstremisme), sehingga isu Palestina tidak mendapat fokus yang konsisten. Secara keseluruhan, Nugraha (2017) menggarisbawahi bahwa OKI lebih berfungsi sebagai forum retorika dan simbolis ketimbang sebagai aktor politik yang transformatif dalam konflik Palestina-Israel, sebuah temuan yang sangat relevan untuk menguji apakah Deklarasi KTT Luar Biasa OKI 1-5 berhasil memutus siklus inefektivitas struktural ini.
2. Penelitian Atep Abdurrofiq tentang “*Identitas Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina*” (2016), menempatkan penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI 2016 sebagai ekspresi identitas Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini membantu saya memahami perspektif konstruktivis, Atep menunjukkan bahwa perilaku

Indonesia pada forum tersebut dipengaruhi oleh identitas nasional dan kepentingan yang terbentuk melalui interaksi internal maupun eksternal, seperti kebutuhan akan pengakuan, hubungan ekonomi, dan perlindungan tenaga kerja di Timur Tengah. Penelitian ini belum menelusuri perkembangan peran Indonesia di OKI dari waktu ke waktu maupun memetakan perubahan dan kontinuitas diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Berbeda dengan itu, penelitian saya menggunakan kerangka penelitian sejarah untuk merekonstruksi perjalanan diplomasi Indonesia di OKI secara kronologis dan kontekstual. Pendekatan ini memberikan kebaruan, yakni menghadirkan pemahaman historis yang lebih utuh mengenai bagaimana KTT OKI 2016 menjadi bagian dari proses panjang evolusi hubungan Indonesia-Palestina dan dinamika peran Indonesia dalam organisasi dunia Islam.

3. Artikel Jurnal “*Peran Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dalam penguatan Diplomasi Islam*” oleh Puri dan Yumitro (2022), artikel ini memberikan fondasi yang kuat mengenai konsep Diplomasi Islam sebagai alternatif dari diplomasi konvensional. Artikel ini menjelaskan bagaimana OKI berperand dalam isu-isu modern, seperti Islamofobia dan bantuan kemanusiaan di Rohingya. Namun, kajian tersebut cenderung bersifat sinkronis, dimana peran OKI dilihat sebagai entitas yang sudah jadi tanpa membedah bagaimana kebijakan tersebut berubah dari waktu ke waktu. Artikel ini belum menyentuh aspek fluktuasi politik dan pergeseran prioritas organisasi yang sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi dunia di masa lalu. Sebagai sebuah studi Hubungan Internasional, fokusnya lebih kepada fungsi organisasi saat ini, sehingga melewatkan narasi sejarah mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan itu berevolusi di tengah krisis.

Jika artikel ini melihat peran OKI secara umum dan fungsional, penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan sejarah yang secara khusus membedah “Dinamika KTT Luar Biasa OKI dalam rentang tahun 1997-2016”. Kebaruan ini terletak pada pemilihan KTT Luar Biasa sebagai objek utama analisis, forum yang hanya terjadi dalam situasi darurat

dunia Islam. Dengan meneliti periode 1997 hingga 2016. Penelitian yang penulis lakukan ini merekonstruksi bagaimana solidaritas Islam bertransformasi dari sekadar gagasan menjadi tindakan politik nyata dalam merespons konflik besar, mulai dari dampak pasca perang dingin hingga pergolakan Arab Spring. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi Sejarah Peradaban Islam dalam memahami perjalanan panjang institusi politik Islam modern dalam menghadapi tantangan geopolitik dunia yang selalu berubah.

Penelitian mengenai peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam merespons konflik di dunia Muslim telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas dan pengaruh lima rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI dari tahun 1997 hingga 2016 masih terbatas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (Historis) dalam menggali dan merekonstruksi jejak sejarah KTT Luar Biasa OKI ke 1-5 dari tahun 1997-2016 serta menganalisis konflik yang melatar belakangi rangkaian kelima KTT Luar Biasa tersebut. Metodologi sejarah merupakan prosedur atau metode yang digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah di masa lampau.¹⁵ Langkah-langkah dalam penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Keempat aspek metode ini, merupakan sarana yang mesti benar-benar dijalankan oleh seorang peneliti sejarah karena akan menentukan seberapa kuat hasil penelitian sejarah ini. Adapun yang paling pertama ialah Heuristik atau dipahami juga sebagai aspek pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian sejarah yang sedang diteliti.

1. Heuristik

Heuristik adalah langkah awal yang sangat penting dalam penelitian sejarah, yakni pengumpulan berbagai sumber-sumber sejarah dari topik yang diteliti

¹⁵ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

meliputi benda-benda, dokumen, foto-foto, dan lain sebagainya.¹⁶ Dalam tahap heuristik ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk menghimpun sumber primer dan sekunder yang relevan terhadap kronik KTT Luar Biasa (LB) OKI, mulai dari KTT LB ke-1 di Islamabad (1997) hingga KTT LB ke-5 di Jakarta (2016). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran arsip digital pada situs resmi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta repositori Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNISPAL dan Digital Library PBB) untuk memperoleh naskah deklarasi asli dan koResponsdensi diplomatik terkait isu Palestina, Irak, dan Suriah.

Selain itu, penulis melakukan koResponsdensi melalui surat elektronik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna mengakses dokumen resmi pemerintah, naskah deklarasi, serta arsip digital yang mendokumentasikan peran diplomasi Indonesia dalam rangkaian KTT tersebut. Seluruh sumber ini divalidasi dengan portal berita resmi pemerintah dan literatur pendukung untuk memastikan akurasi data historis pada setiap periode pertemuan. Adapun hasil temuan yang penulis dapatkan diantaranya:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber sejarah yang paling utama dan memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dalam kedudukan sumber. Oleh karena itu, sebuah penelitian sejarah kuat atau lemahnya dapat dilihat dari penggunaan sumber primer dari banyaknya dan kesesuaiannya. Sumber primer ini, mestilah sezaman dengan peristiwa yang diteliti, maka dokumen-dokumen ini menjadi saksi sejarah dan sumber utamanya. Adapun sumber primer yang rencana dipakai ialah:

1) Sumber Arsip

- a) *Islamabad Declaration 1997*
- b) *Final Communiqué of the First Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference 1997*

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013).

- c) *Final Communiqué of the Second Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference 2003*
- d) *Makkah Declaration 2005*
- e) *OIC Ten-Year Programme of Action (TYPOA)*
- f) *Makkah declaration 2012*
- g) *Final Communiqué of the Fourth Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference 2012*
- h) *Deklarasi Jakarta 2016*
- i) *Resolusi KTT LB OKI ke-5 tahun 2016*
- j) *Pidato resmi Raja Abdullah (2005) – Kutipan pidato pembukaan*
- k) *Pidato resmi Raja Abdullah (2012) – Kutipan pidato melalui berita Arab News*
- l) *Pidato resmi Joko Widodo (2016) – Transkrip pidato*
- 2) *Sumber Benda*
 - 1. *Foto-foto dokumentasi KTT LB OKI*
- b. *Sumber Sekunder*
- 3) *Sumber Buku*
 - 1. Ekemeledin Ihsanoglu. *The Islamic World in the new Century*. Columbia University Press, 2010
 - 2. Turan Kayaoglu. *The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential*. Taylor & Francis, 2015
 - 3. Lynch Marc. *The New Arab Wars: Uprisings and Anarchy in the Middle East*. Public Affairs, 2014
 - 4. Buzan, Barry. *People, States, and Fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era*. New York: Harvester Wheatsheaf
 - 5. Anthony Giddens. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, 1984
 - 6. Fawzy Al-Ghadiyry. *Sejarah Palestina: Asal-muasal konflik Palestina-Israel*. Yogyakarta: BookMarks, 2010

7. Charles D. Smith, *Palestine and the Arab-Israeli Conflict*. 6th ed. Boston: Bedford/ St. Martin's, 2017

4) Sumber Artikel

1. Artikel Resmi Sekretariat Kabinet RI, artikel ini berjudul “Akhir KTT LB OKI ke-5, Presiden Jokowi Suarakan Pesan Keras Pemimpin Islam Terhadap Konflik Palestina” diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2016 oleh laman resmi Sekretariat Kabinet RI

5) Sumber Jurnal

1. Atep Abdurrofiq, “Identitas Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait KTT LB OKI ke-5 tahun 2016 di Jakarta,” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 19 no.2 (2016)
2. Cantika Niscala, Gonda Yumitro “Peran Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dalam penguatan Diplomasi Islam,” *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8 no. 1 (2022)
3. Firdaus Muhammad Iqbal, “Islamic Cooperation Organization from the Perspective of International Law: Attitudes and Contributions in the Last Two Decades”, *Intellectual Law Review (ILRE)* vol. 1 No. 1, 2023
4. Sabda Ningsih, “Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sebagai Entitas Kosmopolitan Demokratik: Analisis Dinamika Internal dan tantangan Struktural”, *Indonesian Journal of International Relations (IJIR)* vol. 9 no. 2, 2025

2. Kritik

Kritik merupakan sebuah kajian tentang sumber-sumber sejarah yang bertujuan untuk mencari keotentikan dari sumber yang di dapat dan kredibilitas data yang terkandung dalam sumber-sumber sejarah. Adapun kritik terbagi pada dua yaitu, ekstern (otentitas sumber) dan intern (kredibilitas sumber).¹⁷

a. Kritik Eksternal

Kritik Ekstern ditujukan untuk melihat otentisitas dari sumber sumber

¹⁷ Kuntowijoyo.

yang penulis dapatkan, meliputi penelaahan terhadap asal sumber, bentuknya, tulisan-tulisannya dan kertas bila dokumen berbentuk fisik, diantaranya:

i. Sumber Arsip

1. Deklarasi Jakarta, dokumen ini merupakan hasil dari KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun 2016 di Jakarta. Dokumen ini penulis dapatkan di website resmi OKI di halaman *Arsip Conference, Extraordinary/Emergency Islamic Summits, 5th Extraordinary Islamic Summit Conference, Declaration* berupa PDF sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam dokumen yang berjudul “*Jakarta Declaration on Palestine and Al-Quds Al-Sharif Submitted to The Fifth Extraordinary Islamic Summit on Palestine and Al-Quds Al-Sharif ‘United for a Just Solution’*” yang diterbitkan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 7 Maret 2016, dengan no Surat OIC/EX-SUM-5/PAL/2016/DEC.

Dokumen ini dihasilkan dan disahkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yang merupakan badan otoritas tertinggi dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI). KTT Luar Biasa ke-5 ini telah didahului oleh Pertemuan Pejabat Tinggi (SOM) dan Pertemuan Tingkat Menteri (KTM) pada 6 Maret 2016. Proses bertingkat ini memastikan bahwa draf Deklarasi Jakarta telah melalui proses konsultasi dan negosiasi yang ketat sebelum disahkan di tingkat Kepala Negara, hal ini menghilangkan keraguan mengenai proses penyusunannya. Dokumen ini diterbitkan sebagai teks final yang mencakup 23 butir komitmen strategis yang tidak dapat diubah setelah diumumkan pada 7 Maret 2016. Teks yang beredar luas di media dan lembaga pemerintah menunjukkan konsistensi dalam 23 poin tersebut, tampilan dokumen menggunakan Bahasa Inggris.

2. Resolusi KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun 2016, dokumen ini penulis dapatkan di website resmi OKI di halaman *Arsip Conference, Extraordinary/Emergency Islamic Summits, 5th Extraordinary Islamic Summit Conference, Resolution* berupa PDF sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dokumen yang berjudul “*Resolution on Palestine and Al-Quds Al-Sharif Submitted to The Fifth*

Extraordinary OIC Summit on Palestine and Al-Quds Al-Sharif “United for a Just Solution”” diterbitkan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 7 Maret 2016 dengan no surat OIC/EX-SUM-5/PAL/2016/RESOLUTION. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan hukum dan institusional yang mendasari keberanian politik yang terkandung dalam Deklarasi Jakarta. Resolusi ini adalah produk standar dari mekanisme OKI, yang diproses melalui Sekretariat Jendral dan disahkan di tingkat KTT. Resolusi OKI umumnya mengikuti format hukum yang ketat dan jarang rentan terhadap pemalsuan di tingkat publik, ini menjamin keasliannya. Teksnya cenderung berfokus pada penegasan prinsip dan komitmen OKI secara umum.

3. *Final Communiqué KTT LB OKI ke-4* (2012), dokumen ini dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal OKI pada tahun 2012 dengan nomor OIC/EX-SUM-4/2012/FC/FINAL, sumber ini memiliki keaslian yang sangat kuat karena dipublikasi oleh badan resmi OKI. Dokumen ini merupakan dokumen komprehensif 40 poin.
4. *OIC Ten-Year Programme of Action (TYPOA)*, dokumen ini lahir sebagai Respons langsung terhadap tantangan global dunia Islam pasca peristiwa 11 September 2001 (9/11) yang dirumuskan pada KTT LB ke-3 di Makkah pada Desember 2005. Dokumen ini penulis dapatkan di situs resmi OIC ww1.oic-oci.org. dokumen ini dapat dijamin keasliannya karena diterbitkan oleh badan resmi dan setelah penulis *crosscheck* peredarannya di mediapun tetap sama tanpa ada yang berubah dalam konteksnya.
5. *Makkah Declaration* 2005, dokumen ini penulis dapatkan dari situs resmi OKI bisa dijamin keasliannya. Dokumen yang berjudul *Makkah al-Mukarramah Declaration, third session of The extraordinary Islamic Summit Conference* ini berbahasa Inggris.
6. *Declaration on Palestine/Final Communiqué of the Second Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference* 2003, dokumen ini penulis dapatkan di website resmi PBB pada bagian [digitallibrary.un.org/unispal/document/The Question of Palestine](http://digitallibrary.un.org/unispal/document/The%20Question%20of%20Palestine),

dokumen ini ditandatangani oleh Nassir Abdulaziz Al-Nasser selaku *Ambassador Permanent Representative*. Nomor dokumen A/57/748|S/2002/288, *Document type Letter*, dipublikasikan 06 Maret 2003.

7. *Islamabad Declaration of The Extraordinary Session of The Islamic Summit*, dokumen ini merupakan dokumen resmi dari KTT LB OKI pertama di Islamabad, Pakistan. Dokumen ini penulis dapatkan dari arsip resmi PBB dalam bentuk pdf, *General Assembly Security Council*, nomor arsip A/51/915/S/1997/433 dipublikasikan pada 6 Juni 1997. Dokumen ini berjudul *Letter dated 7 May 1997 from the permanent Representative of Pakistan to the United Nations addressed to the Secretary-General*, ditandatangani oleh Ahmad Kamal sebagai *Ambassador Permanent Representative*.
8. Transkrip Pidato Presiden oleh Humas Sekretariat Negara, “Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pernyataan Pers bersama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Sekjen OKI Iyad Ameen Madani usai Penutupan KTT Luar Biasa OKI ke-5 di JCC, Jakarta, 7 Maret 2016”. Dipublikasikan tanggal 8 Maret 2016 di laman resmi Sekretariat Negara RI. Seperti transkrip pidato sebelumnya, transkrip ini bersifat otentik dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena diterbitkan langsung oleh badan resmi negara.

ii. Sumber Benda

1. Foto-foto dokumentasi KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun 2016. Foto-foto ini penulis dapatkan dari laman resmi Setkab RI, Setneg RI, Kemenlu RI, dan artikel berita sezaman yang memberitakan KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun 2016 di Jakarta, dapat dipasangkan keaslian fotonya Foto digital berwarna yang menampilkan prosesi KTT Luar Biasa OKI ke-5 tahun 2016 dengan jelas.

b. Kritik Internal

Kritik Intern merupakan penilaian keakuran atau kredibilitas terhadap sumber sejarah.

i. Sumber Arsip

1. Deklarasi Jakarta, secara internal dokumen ini memiliki kredibilitas tinggi dalam menggambarkan keseriusan diplomatik Indonesia terutama untuk Palestina, 23 butir komitmen strategisnya menyuarakan seruan konkret seperti dukungan terhadap boikot produk Israel. Deklarasi ini konsisten dalam mengaitkan isu Palestina dan Al-Quds dengan legitimasi internasional seperti Piagam OKI, Piagam PBB, dan resolusi-resolusi sebelumnya, namun karena merupakan dokumen hasil kompromi banyak negara, narasinya cenderung menghindari uraian teknis dan memilih menonjolkan kesatuan sikap lewat formulasi yang repetitif dan retorik. Terdapat bias diplomatik yang wajar, seperti penegasan peran beberapa negara tertentu serta fokus kuat pada solidaritas, sehingga pembaca perlu menyadari bahwa dokumen ini lebih berfungsi sebagai *statement of intent* daripada laporan empiris.

Meski demikian, nilai arsip Deklarasi Jakarta bagi penelitian ini sangat penting, karena ia merepresentasikan suara resmi dan momentum diplomasi kolektif dunia Islam pada 2016, sekaligus memberikan gambaran autentik tentang bagaimana Indonesia, sebagai tuan rumah, menempatkan diri dalam isu Palestina dan memainkan peran diplomatiknya di panggung internasional. Dokumen ini menjadi titik pijak utama untuk menilai arah kebijakan, komitmen, dan orientasi politik dalam KTT tersebut. Namun demikian, sifat deklaratif dokumen ini membuat penelitian perlu mengembangkannya dengan membandingkan proses di balik layar, dinamika negosiasi, serta implementasi nyata dari komitmen yang tercantum, melalui sumber-sumber lain seperti pidato kepala negara, siaran resmi Setkab, resolusi KTT OKI lainnya, laporan media, dan kajian akademik. Deklarasi Jakarta berfungsi sebagai sumber primer yang kuat dalam menunjukkan sikap politik resmi, tetapi tetap harus dipadukan dengan sumber tambahan agar analisis sejarah diplomasi Indonesia dalam

KTT LB OKI 2016 menjadi lebih utuh dan mendalam.

2. Resolusi KTT LB OKI 2016, dokumen ini berisi tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif menegaskan kembali bahwa isu Palestina merupakan persoalan utama umat Islam. Dokumen ini dibuka dengan dasar normatif yang merujuk pada Piagam OKI, resolusi-resolusi PBB, serta kondisi aktual yang menggambarkan meningkatnya pelanggaran Israel, termasuk kekerasan terhadap warga sipil, pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsa, perluasan permukiman ilegal, dan upaya sistematis mengubah identitas, demografi, serta status hukum Al-Quds. Seluruh tindakan ini dinyatakan tidak sah menurut hukum internasional.

Isi resolusi dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian besar. Pertama, penegasan sikap politik OKI, yaitu bahwa seluruh wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 adalah wilayah sah Palestina dan bahwa Al-Aqsa merupakan hak eksklusif umat Islam. OKI menolak semua tindakan Israel yang mengubah status quo wilayah tersebut. Kedua, tuntutan kepada komunitas internasional, terutama kepada Dewan Keamanan PBB, agar mengambil langkah tegas menghentikan pendudukan, melindungi rakyat Palestina, menolak produk permukiman ilegal, serta mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB dan upaya UNESCO menjaga warisan sejarah Al-Quds. Ketiga, komitmen negara-negara anggota, yang mencakup dukungan politik, ekonomi, kemanusiaan, implementasi rencana pembangunan Al-Quds, dorongan rekonsiliasi internal Palestina, serta perlawanan terhadap blokade Gaza. Keempat, apresiasi, yaitu penghargaan terhadap negara-negara yang memberi dukungan signifikan, seperti Indonesia, Maroko, Yordania, Arab Saudi, Aljazair, Swedia, dan Vatikan. Dokumen ditutup dengan mandat kepada Sekjen OKI untuk memantau implementasinya.

Secara internal, resolusi ini merefleksikan solidaritas kuat negara-negara OKI, namun juga memperlihatkan sejumlah kelemahan struktural. Dokumen sangat normatif dan banyak berisi kecaman serta seruan tanpa disertai mekanisme implementatif atau indikator keberhasilan yang jelas.

Keketergantungan pada Dewan Keamanan PBB yang justru dikritik kegagalannya menunjukkan tidak adanya strategi alternatif yang lebih mandiri. Seruan perlindungan terhadap warga Palestina juga tidak diikuti desain konkret mengenai mekanisme bantuan atau pemantauan. Selain itu, narasi yang berulang mengurangi ketajaman analisis, sementara penonjolan peran negara tertentu menimbulkan kesan ketidakseimbangan dalam solidaritas OKI. Tidak adanya refleksi kapasitas internal organisasi semakin menjadikan dokumen ini lebih sebagai pernyataan sikap politik daripada instrumen kebijakan yang efektif.

Dengan demikian, resolusi ini penting sebagai penegasan komitmen politik kolektif terhadap Palestina, tetapi efektivitas praktisnya terbatas karena kurangnya strategi operasional, alternatif diplomasi baru, dan kerangka pelaksanaan yang dapat dijalankan secara bersama oleh negara-negara anggota OKI.

3. *Final Communique KTT LB OKI ke-4 (2012)*, dokumen ini berisi putusan akhir atas pembekuan keanggotaan Suria. Dalam dokumen ini banyak pernyataan umum, terutama soal Rohingya dan Palestina. Keputusan soal Suriah mencerminkan konflik blok Arab Saudi-Iran. Selain itu, Dokumen ini membantu penulis memahami latar belakang krisis Suriah yang dipicu oleh *Arab Spring* dan eskalasi krisis Rohingya. Dokumen ini adalah bukti formal bahwa OKI mampu mengambil keputusan politik yang drastis, namun implementasi dan dampaknya harus di uji ketat ,mengingat adanya fragmentasi internal kuat pada saat itu.
4. *OIC Ten-Year Programme of Action (TYPOA)*, dokumen ini berisi tentang program aksi 10 tahun OKI, disahkan pada sidang KTT LB OKI ke-3 di Makkah tahun 2005. Program ini meninjau isu krusial seperti promosi moderasi dan toleransi, pemberantasan ekstremisme serta terorisme, penanganan Islamofobia, peningkatan solidaritas antarnegara anggota, pencegahan konflik, serta penyelesaian isu Palestina dan minoritas Muslim. Selain itu, TYPOA menekankan Kerja sama ekonomi untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara anggota yang terdampak konflik

dan negara berkembang paling miskin, serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, dan hak asasi manusia di dunia Islam. Dalam dokumen ini penulis bisa memahami resolusi KTT LB OKI ke-3 dan program aksi 10 tahun OKI.

5. *Makkah Declaration*, deklarasi merupakan hasil utama dari KTT Luar Biasa OKI ke-3 yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2005 di Mekah, Arab Saudi. Dalam Deklarasi Mekah, negara-negara anggota OKI menegaskan komitmen untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota dalam rangka membela kepentingan bersama dunia Islam, termasuk isu Palestina, penanggulangan kemiskinan, pemberantasan terorisme, perjuangan melawan Islamofobia dan intoleransi, serta peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya moderasi dan kerukunan antarumat beragama serta dialog antarperadaban. Deklarasi Mekah menjadi landasan penting bagi banyak kebijakan dan program kerja OKI selama sepuluh tahun ke depan, termasuk pembentukan Pusat Dialog antar Madzhab Islam dan berbagai inisiatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan solidaritas anggota OKI dalam menghadapi tantangan global. Dokumen ini diadopsi sebagai blueprint atau cetak biru untuk kemajuan dan reformasi OKI hingga 2015.
6. *Declaration on Palestine/Final Communiqué of the Second Extraordinary Session of the Islamic Summit Conference 2003*, dokumen ini merupakan pernyataan resmi OKI mengenai situasi Irak yang mencangkup: penolakan kategori terhadap serangan atau ancaman terhadap Irak, penekanan bahwa masalah Irak harus di selesaikan melalui cara-cara damai dalam kerangka PBB, pernyataan bahwa negara-negara Islam akan menolak berpartisipasi dalam tindakan militer yang menargetkan keamanan dan integritas wilayah Irak atau negara Islam lainnya, tuntutan agar blokade yang dikenakan pada rakyat Irak dicabut. Dalam dokumen yang penulis dapatkan ini terdapat deklarasi tentang Palestina, deklarasi ini berisi dukungan kepada Palestina, tuntutan pemulihan hak-hak Palestina,

penghentian agresi Israel, penghianatan pembanguna tembok apartheid, perlindungan inetrnasional.

7. *Islamabad Declaration of The Extraordinary Session of The Islamic Summit*, Dokumen ini merupakan deklarasi utama dari KTT Luar Biasa pertama OKI dan mencakup 26 poin pernyataan yang mendeskripsikan posisi negara-negara OKI mengenai berbagai isu internasional. KTT ini diselenggarakan pada tahun 1997 di Islamabad, Pakistan. Deklarasi tersebut dipimpin oleh prinsip-prinsip Islam tentang solidaritas dan Kerja sama di antara negara-negara OKI dalam menghadapi tantangan global. Dokumen ini juga memuat deklarasi khusus dan diadopsi pada tanggal yang sama, memuat 6 poin spesifik yang menitikberatkan pada isu Palestina dan Yerusalem sebagai fokus utama umat Islam. Dokumen ini menegaskan sikap kolektif OKI terhadap krisis ekonomi regional dan tantangan internal pada akhir 1990-an. Deklarasi ini menekankan perlunya kerja sama ekonomi intra-OKI yang lebih erat untuk menghadapi krisis keuangan dan meningkatkan pembangunan. Ini termasuk seruan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota. Dokumen ini menegaskan kembali prinsip-prinsip OKI, termasuk perlunya solidaritas Islam dalam menghadapi tantangan eksternal dan mempromosikan perdamaian. seperti semua komunike OKI, Deklarasi Islamabad menegaskan kembali posisi teguh OKI mengenai Isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, menuntut penghentian pendudukan Israel dan mendukung hak-hak Palestina.
8. Transkrip Pidato Pernyataan Pers Presiden, dalam pidato ini Presiden menyatakan bahwa KTT ini adalah jawaban Indonesia atas permintaan Presiden Palestina dan refleksi dari komitmen Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Presiden Jokowi menyebut bahwa KTT ini mendorong peranan negara Islam dalam penyelesaian isu Palestina dan penguatan kapasitas bagi Palestina. Presiden juga menyerukan pembentukan negara Palestina berdasarkan solusi dua negara (*Two State Solution*) dan mendorong masyarakat internasional memboikot produk

Israel sebagai bentuk tekanan. Selain itu, Presiden Jokowi menyebut bahwa para pemimpin dunia Islam telah menghasilkan rencana aksi konkrit untuk Palestina dan menyebutkan Deklarasi Jakarta juga Resolusi KTT LB OKI sebagai instrumen penting. Jokowi juga menyatakan bahwa KTT ini wujud peran aktif Indonesia dalam perjuangan Palestina dan menekankan bahwa Indonesia membawa isu Palestina ke panggung dunia Islam. Akan tetapi, dalam pidato tidak ada indikator keberhasilan seperti, target jangka waktu atau mekanisme pemantauan implementasi hasil KTT. Sebagai sumber sejarah, transkrip pernyataan pers Presiden Jokowi sangat bermanfaat karena memberikan bukti langsung, otentik, dan resmi tentang sikap serta strategi diplomatik Indonesia pada KTT OKI 2016. Ia tidak hanya menjadi catatan pidato, tetapi juga jendela penting untuk memahami rekonstruksi kebijakan luar negeri, dinamika diplomasi, serta konstruksi narasi politik Indonesia terhadap isu Palestina.

ii. Sumber Benda

1. Foto-foto dokumentasi KTT Luar Biasa OKI 1-5, foto ini menampilkan potret bersama para kepala negara dan delegasi, konferensi pers akhir KTT, Presiden Indonesia sebagai Ketua KTT memegang palu sidang. Foto ini mendokumentasikan secara resmi jalannya KTT, menunjukkan kehadiran berbagai Kepala Negara atau perwakilan OKI. Sumber ini dapat dianggap otentik karena memiliki ciri khas dokumentasi resmi, termasuk backdrop, logo, tanggal, tema “*United for a Just Solution*” dan set panggung yang konsisten dengan catatan sejarah KTT LB OKI 2016 “*The 5th Extraordinary OIC Summit on Palestine and Al-Quds Al-Sharif*”.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah Interpretasi atau penafsiran sejarah dan seringkali disebut sebagai analisis sejarah, pada tahap ini sejarawan menafsirkan sumber-sumber yang sebelumnya telah diverifikasi keautentikan dan kredibilitasnya. Sejarawan berusaha menafsirkan, mendeskripsikan, menjelaskan dengan pemikiran sendiri terhadap apa yang telah didapatkan

melalui tahapan heuristik dan kritik.¹⁸

Fungsi dan prinsip interpretasi adalah tahapan penafsiran, yang melibatkan penyusunan fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi menjadi sebuah kisah yang koheren, sekaligus menentukan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar data. Dalam konteks historiografi politik dan diplomasi, interpretasi tidak hanya menyajikan urutan kronologis, tetapi juga harus menjelaskan mengapa aktor tertentu mengambil keputusan. Pada tahap ini, penulis menerapkan teori Strukturalisasi Anthony Giddens, untuk bisa menganalisis proses terbentuknya keputusan politik dan hubungan saling membentuk antara OKI dengan negara anggota lainnya sepanjang periode 1997-2016.

Dalam perspektif Teori Strukturalisasi Anthony Giddens, dinamika antara OKI sebagai agen kolektif dan mekanisme KTT Luar Biasa sebagai struktur dapat dipahami sebagai proses timbal balik yang berlangsung terus-menerus melalui praktik diplomatik negara-negara anggota.¹⁹ Struktur OKI bertindak sebagai kerangka aturan dan sumber daya yang mengatur bagaimana cara anggota merespons isu-isu krisis di dunia Islam. Struktur ini membimbing sekaligus membatasi tindakan agen, karena setiap pernyataan politik, keputusan kolektif, hingga penyelenggaraan KTT harus mengikuti pola yang telah terlembaga.

Namun, pada saat yang sama, tindakan para pemimpin yang bernegosiasi di forum KTT justru menjadi sarana di mana struktur tersebut direproduksi, ditegaskan kembali, atau bahkan diubah. Contohnya, pembekuan keanggotaan Suriah pada KTT-LB 2012 menunjukkan bagaimana agen mampu menggeser batas interpretasi terhadap prinsip non-intervensi dalam Piagam OKI. Melalui interaksi ini, tiga dimensi struktur Giddens yaitu, signifikasi (makna bersama), legitimasi (norma), dan dominasi (kekuasaan dan sumber daya) tampak beroperasi dalam setiap Deklarasi dan *Final Communiqué* yang dihasilkan, menjadikan keluaran KTT bukan sekadar dokumen formal, tetapi manifestasi

¹⁸ Dina Marlina, *Metode Sejarah Lisan* (Bandung: Humaniora, 2023).

¹⁹ Christopher Llyold, *The Structures of History* (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1993).

dari negosiasi politik yang terus membentuk struktur OKI itu sendiri.²⁰

Teori ini memungkinkan penulis menjelaskan mengapa OKI kerap mengeluarkan resolusi yang kuat secara normatif tetapi lemah dalam implementasi, bukan karena struktur OKI semata-mata tidak efektif, melainkan karena negara anggota sebagai agen justru memilih untuk mereproduksi struktur yang menguntungkan kepentingan nasional masing-masing, alih-alih membangun struktur kolektif yang lebih tegas.

Dengan kata lain, teori ini menghubungkan antara konteks historis, praktik diplomatik, dan perkembangan institusional OKI, sehingga dapat menjelaskan bagaimana keputusan KTT LB terbentuk, mengapa isinya seperti itu, serta mengapa hasilnya tidak selalu efektif. Pendekatan ini memberi dasar analitis yang kuat untuk memahami KTT LB sebagai bukan hanya peristiwa diplomatik, tetapi sebagai bagian dari proses historis yang membentuk peranan OKI dalam konflik dunia Islam.

4. Historiografi

Historiografi merupakan sebuah tahap di mana rekonstruksi sejarah dilaksanakan. Seorang penulis mestinya membuat gaya penyajian sejarah dengan cara menghubungkan berbagai fakta yang telah ia dapat dari mulai tahap kritik hingga pengembangan fakta di tahap interpretasi. Oleh karena itu, di sini penulis akan membuat penyajian dengan membentuk berbagai bab khusus yang menyesuaikan dengan kronologi, diakronis dan analisisnya.²¹

Bab I, membahas latar belakang penelitian, tujuan, hingga metode penelitian. Di dalamnya pun ada gambaran umum seputar kajian yang akan dibahas.

Bab II, bab ini membahas rumusan masalah pertama, menguraikan struktur organisasi OKI dan lanskap konflik dunia Islam yang mencakup sejarah pembentukan OKI, struktur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan OKI, Perubahan lanskap konflik dunia Islam 1997-2016

²⁰ Llyold.

²¹ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*.

Bab III, bab ini secara khusus membahas rumusan masalah kedua, Respons OKI terhadap konflik yang terjadi di dunia Islam melalui KTT LB OKI (1997-2016).

Bab IV, bab ini adalah bagian akhir yakni penutup, yang mencakup kesimpulan mengenai apa yang didapatkan dari penelitian ini dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.

